

Pelindung:

Rektor Universitas Pakuan  
Prof. Soedodo Harjoamidjojo,  
Ph.D., M.Sc., Ir.

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Sastra Unpak  
Henny Suharyati, M.A.

Dewan Pakar :

Dr. Hasan Alwi  
Prof. Dr. Partini Sardjono  
Prof. Dr. Sapardi Djoko D.  
Prof. Dr. Soenarjati Dj.  
Dr. Uka Tjandrasasmita

Staf Ahli:

Ade S. Natawiria, M.Si.  
Atikah Ruslianti, S.S.  
Dadan Suwarna, Drs.  
Hanny Harashani, M.Si.  
Leany N. Harsa, M.A.  
Philips Abdullah, M.Hum.  
Sasongko S.Putro, Drs., M.M.  
Teguh I. Subarkah, M.Hum.  
Tetty Yukesti, M.A.  
Yuyus Rustandi, S.Sn.

Staf Redaksi :

Agnes Setyowati H., M.Hum.  
Dedi Yusar, Drs.  
Prapto Waluyo, M.Hum.  
Retno Dewi A., S.S.  
Rina Fitriana, S.S.  
Shita Dewi Ratih P., M.Hum.

Catatan Redaksi

Bahasa merupakan bagian terpenting dari kebudayaan. Manusia dengan menggunakan bahasa dapat membuka tabir dan melakukan eksploitasi terhadap alam. Bahasa digunakan pula untuk mewariskan kebudayaan dari generasi silam ke generasi kini dan dari generasi kini ke generasi mendatang.

Mengerikan, peran bahasa dalam politik. Bahasa dapat berperan sebagai bidan atau malaikat el maut bagi lahirnya atau matinya suatu bangsa/negara. Bahasa Indonesia mampu mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda dipelopori oleh Raden Mas Tirto Adi Soerjo. Kemerdekaan menurut Raden Mas Tirto bukan sebatas kemerdekaan politik saja, melainkan meliputi kemerdekaan jiwa juga. Raden Mas Tirto berhasil melepaskan diri dari jeratan ideologi pengabdian yang dominan di waktu itu. Disebarkannya ideologi kemerdekaan di negeri Insulinde.

Ideologi adalah penjerat kemerdekaan yang lebih halus daripada benang sutra. Contohnya ajaran moral dengan pijakan ideologi patriarki mampu mengesahkan ketidakadilan struktural yang dilakukan masyarakat terhadap perempuan.

Karya sastra merupakan sarana perlawanan terhadap dominasi ideologi patriarki. Saul Bellow melakukan perlawanan terhadap hegemoni ideologi patriarki dengan menampilkan absurditas hidup di dalam novel-novelnya. Edgar Allan Poe dan Nathaniel Hawthorne menampilkan ideologi romantisisme. Teks drama pun memuat ideologi. Mahasiswa yang belajar drama, baik secara praktik maupun teori, terbuka kemungkinan untuk terpengaruh oleh ideologi pengarang yang terselubung di dalamnya.

Gencarnya karya sastra dan media massa melakukan penyisihan terhadap konsep patriarki menyebabkan ideologi tersebut menempati suara pinggiran. Puspo Wardoyo, dengan Poligami *Awardnya*, melakukan pemberontakan terhadap penyingkiran ideologi patriarki. Ia dan kawan-kawan berusaha menempatkan kembali ideologi patriarki pada posisi suara pusat. Ideologi merupakan pijakan dalam berpikir. Pemerintah Jepang menggunakan perubahan ideologi masyarakat dalam rangka pemberantasan terhadap *ijime*.

## PERLAWANAN TIRTO ADHI SOERJO TERHADAP BELANDA

Agnes Setyowati H., M. Hum.

Tirto Adi Soeryo adalah pelopor perlawanan terhadap kezaliman pemerintah Hindia-Belanda dengan cara baru. Sebelum periode TAS, perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda dilakukan dengan cara militer (perang), misalnya perlawanan Pangeran Diponegoro. Ia tidak membedakan antara budaya Barat dan kekejian pemerintah Hindia Belanda, maka ditolakny setiap peradaban dari Barat.

Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan cara militer, sedangkan organisasi militer dan persenjataan Hindia-Belanda lebih kuat, dan biaya Perang Diponegoro oleh pemerintah Hindia-Belanda dibebankan kepada rakyat Hindia.<sup>1</sup> Perang Diponegoro memberi inspirasi kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk menerapkan *cultuurstelsel*, yang diwujudkan dengan cara memposisikan para bupati sebagai pengawas.<sup>2</sup> Sedangkan Tirto melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda dengan menggunakan budaya Barat.

Kekuatan Tirto dalam melakukan perebutan kemerdekaan adalah penguasaannya terhadap hukum pemerintah

Hindia-Belanda, yang didapatnya dengan cara belajar sendiri. Tirto menggunakan hukum untuk melakukan penilaian terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Didapatinya berbagai penyelewengan kewenangan yang dilakukan aparat pemerintah Hindia-Belanda. Tirto kemudian melakukan berbagai kritik terhadap cara pemerintahan Hindia-Belanda, kritik dilakukan terhadap diri pejabat terendah (kelurahan) sampai dengan pejabat tertinggi di Hindia-Belanda (gubernur jenderal). Dengan kemampuannya pada bidang hukum, Tirto berkali-kali mampu melepaskan diri dari kehendak pemerintah Hindia-Belanda untuk melakukan pengekangan terhadapnya.<sup>3</sup>

Kemerdekaan versi Tirto bukan hanya kemerdekaan politik melainkan kemerdekaan jiwa juga, untuk itu Tirto melakukan pengkaderan guna mendapatkan manusia berjiwa merdeka, salah satu kadernya adalah Mas Marco Kartodikromo, seorang penulis novel "Hikayat Kadiroen" dan "Studen Ijo".<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Pramoedya Ananta Toer, 1985, *Sang Pemula*, Jakarta, Hasta Mitra, hlm. 7.

<sup>4</sup> Mas Marco Kartodikromo kurang dikenal karena sejarah sastra Indonesia masih berpijak pada sejarah sastra peninggalan Hindia-Belanda, yang mengutamakan sastrawan yang menulis dipenerbitan pemerintah (Balai Pustaka), sedangkan Mas Marco ideology Mas Marco bertentangan dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga tulisannya diterbitkan di luar Balai Pustaka.

<sup>1</sup> M.C. Ricklets, 1991, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 177.

<sup>2</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya (Batas-Batas Pembaratan)*, Op.Cit., hlm. 75.

Sebelum periode Tirta, perlawanan terhadap Belanda merupakan perjuangan untuk merebut kekuasaan dari pihak Belanda *an sich*. Sementara, Tirta melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda untuk melawan para pemegang otoritas legal rasional (pejabat pemerintah Hindia-Belanda) yang berlaku zalim. Dengan kata lain, pada periode awal (di zaman pemerintahan Gubernur jenderal Van Heutsz) Tirta melakukan perlawanan terhadap kezaliman, sedangkan pada periode kedua (di zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Idenburg), Tirta melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Pada periode pertama, Tirta membedakan antara kezaliman dan pemerintahan, dan manusia adalah pelaku kezaliman, sehingga Tirta melakukan perlawanan terhadap oknum pejabat yang melakukan penyewengan kewenangan. Baik pejabat itu orang Belanda maupun pribumi, karena, kebaikan tidak berkaitan dengan warna kulit. Sedangkan Sri Ratu bernilai baik menurut Tirta karena ia selalu memberi penghargaan terhadap pejabat pemerintah/lembaga swasta yang berhasil dalam melakukan pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Th Sumartana, 2000, *Raden Mas Tirtoadisuryo (Prngubah Sejarah di Pergantian Abad)*, di dalam "Kompas" edisi tanggal 1 Januari, hlm. 55, merasa bingung melihat sifat kontradiktif dari Tirtoadisuryo, karena di satu sisi ia melakukan pengkritikan terhadap pejabat di Hindia-Belanda namun di sisi lain memuji Ratu Belanda: "...Kalangan *Bestuur Ambtenaar* (administrator pemerintahan) baik kalangan

Jika perlawanan Tirta terhadap penjajahan dinilai berdasarkan kriteria: pribumi non pribumi, maka langkah perjuangan untuk kemerdekaan Tirta akan tampak bersifat kontradiktif, karena, di satu sisi ia melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan — para pegawai pemerintah Hindia-Belanda terhadap warga Hindia-Belanda, namun di sisi lain ia mengagumi Gubernur Jenderal Van Heutsz. Meskipun demikian, jika perlawanan Tirta terhadap pemerintah Hindia-Belanda dipandang sebagai perlawanan terhadap penjajahan pada manusia, dan perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (penyelewengan wewenang), maka akan dapat dipahami bahwa Tirta konsisten dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan tersebut.

Tirta mengagumi Gubernur Jenderal Van Heutsz dengan alasan bahwa Van Heutsz bertangan besi di dalam melakukan pembebasan para budak yang dimiliki para raja di wilayah Hindia-Belanda. Baik kaum pribumi (kalangan bangsawan) maupun orang Belanda menggunakan cara perbudakan

Belanda maupun pribumi disebutnya selaku "Buaya Besar". Namun kepada Sri Ratu dan wangsa Kerajaan Belanda ia puji...." Di sini tampaknya Th Sumartana tidak membedakan antara kebaikan dan perbedaan ras, sementara TAS membedakan antara kebaikan dan ras. Tampaknya, Th Sumartana di dalam usaha memahami TAS terjebak pada oposisi biner: pribumi dan non pribumi, sedangkan TAS berideologi humanis.

untu  
alan

buka  
pribu  
kezal  
hadir  
peleg  
men  
dilak  
di wi  
Hind  
orang  
pemb  
Tirta  
jasa  
budal  
berpe  
penin  
pribu

Belan  
pemer  
politi  
Gube  
adalah

P  
Belan  
berper  
pemer  
koope  
bersik  
Denga

<sup>6</sup> M.C.  
<sup>7</sup> Fram  
<sup>8</sup> M.C.

untuk melakukan pengeksploitasian terhadap alam.<sup>6</sup>

Tirto tidak bersifat rasis, yang ia tolak bukan pemerintah Hindia-Belanda atau pribumi melainkan kezaliman. Waktu itu kezaliman sudah melembaga. Kezaliman hadir dengan dukungan ajaran moral sebagai pelegitimasinya, sehingga kezaliman mendapat predikat baik, perbudakan dilakukan oleh para bangsawan dan para raja di wilayah Hindia tanpa rasa risi. Pemerintah Hindia-Belanda memberi bintang jasa bagi orang-orang yang berjasa di dalam pembebasan para budak. Tirtonoto (kakek Tirto) adalah orang yang mendapat bintang jasa karena melakukan pembebasan para budak di wilayahnya.<sup>7</sup> Watak Tironoto berpengaruh terhadap Tirto, ia anti terhadap penindasan: baik yang dilakukan oleh pribumi maupun orang asing.

Van Deventer mengungkapkan bahwa Belanda berhutang kepada Hindia, sehingga pemerintah Hindia-Belanda menjalankan politik etis untuk membayar hutang tersebut. Gubernur Jenderal Van Heutsz dan Idenburg adalah pelaku politik etis di Hindia.<sup>8</sup>

Pergantian gubernur jenderal Hindia-Belanda, yakni dari Van Heutsz ke Idenburg berpengaruh terhadap sikap Tirto terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Tirto bersikap kooperatif di zaman Van Heutsz, dan ia bersikap non kooperatif di zaman Idenburg. Dengan alasan, Idenburg berusaha

mengendalikan organisasi Sarikat Dagang Islam (SDI),<sup>9</sup> sementara pengendali dari organisasi ini adalah Tirto.

Idenburg bersikap represif terhadap artikel dalam bentuk berita atau opini. Tirto melakukan perlawanan terhadap kebijakan Idenburg tersebut melalui fiksi. Tirto pun membuat cerita dengan tema-tema penyadaran akan pentingnya kemerdekaan.

Konsep kemerdekaan dari Tirto mengalami pergeseran pada periode pemerintahan Idenburg. Jika Tirto pada masa Van Heutsz memilahkan antara individu dan lembaga pemerintahan, dan Tirto menyokong kemerdekaan individu, maka Tirto pada masa pemerintahan Idenburg memandang sama antara ras dan penajahan politik, dan Tirto menyokong kemerdekaan politik kaum pribumi.

Tirto melakukan penilaian bahwa bangsa Belanda telah menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa taklukan, pembentukan watak sebagai bangsa taklukan dilakukan dengan cara mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk bermental budak, "yang hanya tahu akan berbagai kewajiban namun dibutakan tentang hak-haknya, bahkan hak tentang kemanusiaannya."<sup>10</sup>

Tirto berpendapat bahwa penderitaan bangsa Indonesia disebabkan oleh kesalahan sistem pemerintahan Hindia-Belanda dan para pegawainya. Sistem pemerintahan Hindia Belanda berpihak kepada orang Belanda dan kaum bangsawan, dan

<sup>6</sup> M.C. Ricklets, *Op.Cit.*, hlm. 45.

<sup>7</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>8</sup> M.C. Ricklets, *Op.Cit.*, hlm. 228.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

<sup>10</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Op.Cit.*, hlm. 62.

ketidaktegasan dalam membasmi korupsi merupakan penyebab warga Hindia menderita. "Korupsi yang dilakukan oleh aparat, mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat menambah penderitaan bangsa yang diperintah."<sup>11</sup>

Perjuangan kemerdekaan Tirta yang berdasarkan kepada identitas kebangsaan dia proklamirkan pada saat resepsi pengangkatan patih Bandung, Tirta berpidato dengan isi antara lain sebagai berikut: ia bangga sebagai pribumi, dengan alasan pribumi menghidupi orang dan negara Belanda. Selain itu, ia menyokong para kaum mardhika (wiraswasta), yang hidup bukan berpijak pada upah (gaji) melainkan berpijak pada hasil dari berwiraswasta.<sup>12</sup> Ucapan Tirta ini merupakan kritik tajam terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Waktu itu, orang Belanda, para pegawai pemerintahan Belanda, dan terutama patih Bandung tersinggung oleh ucapan Tirta tersebut.

Pada umumnya kalangan intelektual berpihak kepada birokrat. Sehingga, isi pidato para intelektual merupakan penguat bagi pelegitimasi kekuasaan sang birokrat, ini yang dilakukan kaum intelektual yang berpihak kepada penguasa legal formal. Sedangkan Tirta berpihak kepada kelompok pribumi dan orang-orang yang berada di luar pemerintahan, sehingga, pemikiran Tirta terasa baru dan mencengangkan untuk tataran wacana waktu itu.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63 et seqq.

Isi pidato Tirta berisi ajaran moralitas baru. Tirta memaklumkan bahwa kebaikan berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu: kemerdekaan dari sisi pemikiran dan perekonomian. Sebelumnya, baik dan buruk sebatas tradisi dan perintah dari pemilik kebijakan, konsep baik dan buruk ini merupakan hasil pemikiran dari para intelektual yang berpihak kepada penguasa. Tirta membuat terobosan dalam bidang moral.

Patih Bandung tersinggung oleh isi pidato Tirta. Beberapa hari kemudian patih Bandung menyergap dan menggelandang seorang wiraswasta muda, yang diadili atas dakwaan patih Bandung. Di sini, patih Bandung menggunakan kekuasaan sebagai sarana pelampiasan emosi. Dengan kata lain, patih Bandung membuat kebijakan berdasarkan tekanan emosi, suatu orientasi perilaku paling rendah menurut Max Webber.<sup>13</sup>

Tindakan patih Bandung mendiamkan Tirta dapat dipandang suatu kebijakan dengan perhitungan yang berdasar pada afeksi. Dengan alasan, Patih Bandung merasa takut terhadap kekuatan berita dan kehandalan Tirta di bidang hukum. Di sini, terlihat pula bahwa di zaman Hindia-Belanda terjadi peristiwa seorang pemimpin tidak formal lebih berkuasa dari pemimpin legal formal, karena sang pemimpin non formal lebih memiliki kualitas pemikiran dan

<sup>13</sup> Doyle Paul Johnson, 1988, *Teori Sosiologi (Klasik dan Modern)*. Jakarta, Gramedia, hlm. 221.

karakter daripada sang pemimpin formal. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum dihargai pada zaman penjajahan Belanda, bagaimana peran hukum secara konkret di dalam masyarakat di zaman kemerdekaan? Jawabnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tirto hadir sebagai pemimpin kharismatik karena ia berhasil di dalam melakukan pembelaan terhadap orang-orang tertindas. Korban kesewenang-wenangan patih Bandung dibela Tirto secara suka rela. Tirto sukses di dalam melakukan pembelaan, sehingga orang yang didakwa diputus bebas oleh pengadilan.<sup>14</sup>

Pada waktu itu, konflik di antara sesama jurnalis terhitung kuat. Sewaktu Tirto konflik dengan Dominique Willem Baretty (orang Itali), Baretty dan kawan-kawan mendatangi redaksi MP, meminta TAS untuk meralat beberapa tulisannya di MP, permohonan tersebut ditolak Tirto. Baretty mengancam akan mencambuk Tirto, dan Tirto tidak gentar oleh ancaman tersebut. Akhirnya, Baretty dan kawan-kawan melakukan pencambukan terhadap Tirto.<sup>15</sup> Pencambukan merupakan salah satu cara penghukuman model kuno agar pengetahuan (berita) dari Tirto dapat dikontrol oleh Baretty, dengan alasan pengetahuan berkaitan dengan kekuasaan.<sup>16</sup>

Sumber kekuasaan dapat beragam. Tirto hadir sebagai pemimpin non formal karena media massa, keberaniannya mengemukakan pendapat, dan selalu siap melakukan pembelaan secara hukum terhadap berbagai kalangan yang tertindas oleh pemilik otoritas legal rasional. Sedangkan Baretty dan kawan-kawan mencari kekuasaan berdasarkan kepada kekerasan. Baretty menamakan dirinya "De Zweep" (Si Cambuk). Konflik antara Tirto (kekuasaan berdasarkan pada kemanusiaan) dan Baretty (kekuasaan berdasar pada kekerasan) dimenangkan oleh TAS. Kekuasaan dengan sumber kekerasan milik Si Cambuk bersifat rapuh.

Sikap professional telah ditunjukkan oleh Tirto. Ia tidak gentar oleh ancaman dan penyiksaan fisik. Yang dilakukan Tirto dalam rangka mempertahankan keyakinan yang telah ia tulis di media massa. Sebagai konsekuensi dari sikap professional Tirto, iklan dan oplah penjualan MP naik.

Isi berita di dalam media massa pimpinan Tirto berpihak kepada kalangan yang dikuasai (bukan penguasa). Dampaknya, Tirto berhadapan dengan pemegang otoritas legal rasional. Tirto dipaksa untuk mengakui adanya kekuasaan yang dilakukan dengan cara penghukuman. Baretty melakukan penghukuman dengan cambuk, sedangkan pemerintah Hindia-Belanda melakukan penghukuman dengan cara mengasingkan Tirto ke Lampung. Baik pencambukan maupun pengasingan bertujuan agar Tirto takluk terhadap lembaga pemerintah Hindia-Belanda.

<sup>14</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>16</sup> Madan Sarup, 1988, *An Introductory Guide to Poststructuralism And Postmodernism*. New York, Harvester Wheatsheaf, hlm. 73.

Tirto melakukan berbagai pembelaan terhadap kalangan tertindas di Lampung, sehingga, dalam waktu dua bulan TAS telah mewujud sebagai pemimpin non-formal di Lampung. Atas berbagai aktivitasnya di tempat pembuangan tersebut, pembuangan TAS di Lampung membawanya pada puncak popularitas.

Max Webber mengatakan bahwa pemimpin kharismatik lahir karena pembelaannya terhadap kalangan tertindas, dan pembelaan tersebut dilakukan tanpa pamrih.<sup>17</sup> Tirto melakukan pembelaan terhadap kalangan tertindas tanpa pamrih. Selain itu, ia berani menanggung derita seorang diri. Dampaknya, Tirto pun hadir sebagai pemimpin kharismatik. Jika sewaktu Tirto pergi ke tempat pembuangan tanpa perhatian, maka Tirto mendapatkan perhatian besar setelah kembali dari tempat pembuangan. Ia datang di Bogor dengan sambutan banyak surat yang isinya adalah permohonan akan bantuan hukum dari berbagai daerah, kemudian Tirto pun kembali keliling Jawa untuk memberikan ceramah tentang kesadaran hukum kepada masyarakat.

Gubernur Hindia-Belanda menggunakan cara berpikir rasional instrumental di dalam menangani kekritisannya Tirto. Cara berpikir ini berpijak pada perhitungan rasio dengan menyisihkan suara hati.<sup>18</sup> Di satu sisi, Tirto dibuang ke Lampung. Di sisi lain, laporan Tirto mengenai berbagai pemerasan yang

dilakukan pegawai pemerintahan Hindia-Belanda ditanggapinya. Pemerintah Hindia-Belanda melakukan berbagai perbaikan mengenai sistem dan pemerintahan di Lampung berdasarkan laporan Tirto.

Penasihat pemerintah Hindia-Belanda (G. Rinkes) menanggapi pernyataan dari TAS secara emotif. Ia, di dalam suratnya kepada gubernur jenderal, melakukan pembelaan terhadap para pejabat di Lampung. Pembelaan dilakukan dengan cara melakukan penggambaran bahwa Tirto telah berbohong di dalam berbagai tulisannya. Karena, menurut Rinkes, pejabat pemerintah di Lampung tidak akan melakukan pemerasan terhadap rakyat.<sup>19</sup>

Rinkes dalam usahanya untuk meruntuhkan kepercayaan gubernur jenderal terhadap Tirto telah berbicara persoalan "yang mungkin" dan "yang tidak mungkin". Sementara, Tirto melakukan pelaporan mengenai persoalan ketatanegaraan, sosial dan ekonomi. Layaknya, Rinkes melakukan penelitian untuk membuktikan kesahihan laporan dari Tirto.

Konflik antara Rinkes dan Tirto merupakan konflik antara intelektual organik dan intelektual mandiri. Isi pengetahuan dari intelektual organik yakni gagasan-gagasan tentang keselamatan (kepentingan) status quo dan keselamatan (kepentingan) dirinya sendiri. Sedangkan intelektual mandiri akan menghasilkan pengetahuan tentang

<sup>17</sup> Doyle Paul Johnson, *Op.Cit.*, hlm. 222.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>19</sup> Premoedya Ananta Toer, *Op.Cit.*, hlm. 58.

kebenaran (realitas).<sup>20</sup> Dan, tanggapan positif dari Idenburg terhadap laporan Tirto bagi Rinkes merupakan wacana yang membahayakan kedudukannya sebagai intelektual organik.

### PERLAWANAN DENGAN SARANA MEDIA MASSA

Keberanian moralitas Tirto dalam melakukan perlawanan terhadap wacana dari media massa yang berorientasi pada penguasa mendapat perhatian dari Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah Hindia-Belanda ini ahli di dalam agama Islam.<sup>21</sup> Snouck Hurgronje memberi rekomendasi negatif mengenai Tirto. Namun, Tirto mendapat simpati dari Bupati Cianjur R.A.A. Prawiradirja. Dengan alasan R.A.A. Prawiradirja mampu membaca secara terbalik, laporan negatif dari Hurgronje dibaca positif (sebaliknya). Di dalam pertemuan antara Tirto dan bupati Cianjur di Bandung, Tirto ditawarkan modal untuk menerbitkan media *Soenda Berita*, suatu media dengan pengola dan modal asli dari pribumi.

R.A.A. Prawiradirja memberi bantuan f 1000 kepada Tirto guna mendirikan NV *Medan Prijaji*. NV ini merupakan NV pertama yang didirikan oleh pribumi, dan *Medan Prijaji* berhasil berfungsi sebagai pengawal pendapat umum. Pada tahun 1907,

Tirto berhasil melakukan pembongkaran terhadap skandal yang dilakukan Aspiran Kontrolir Purworedjo A. Simon dengan menggunakan MP.

Hubungan antara Tirto dan R.A.A. Prawiradirja terbilang harmonis. Bupati Cianjur ini membantu di bidang pemasaran. Antara pemimpin formal Hindia-Belanda (Bupati Cianjur) dan Tirto bahu-membahu dalam membentuk berita dari sudut pandang pribumi (bukan penjajah). Kasus ini memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap Belanda dilakukan bukan hanya dengan cara nonkooperatif, Tirto dan R.A.A. Prawiradirja melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda dengan menggunakan cara kooperatif, yaitu perlawanan dalam bentuk wacana. Perlawanan dilakukan dengan cara membongkar hegemoni berita<sup>22</sup> dari sudut pandang Belanda.

R.A.A. Prawiradirja berkedudukan sebagai bupati Cianjur (pemimpin legal formal Hindia-Belanda). Meskipun demikian, ia mendukung perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda pada bidang budaya. Dengan alasan, R.A.A. Prawiradirja adalah pendukung budaya Sunda. Keberagaman identitas R.A.A. Prawiradirja mengarahkan sikapnya yang beragam pula.

Tirto menggunakan media massa sebagai perjuangan untuk melakukan pemerdekaan. Sebelum Tirto hadir di dalam dunia

<sup>20</sup> Antonio Gramsci, 1991, *Selection From Cultural Writing*. Cambridge, Harvard University Press, hlm. 390.

<sup>21</sup> Dennys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya (Batas-Batas Pembaratan)*, *Op. Cit.*, hlm. 116.

<sup>22</sup> Antonio Gramsci, *Op. Cit.*, hlm. 14.



jurnalistik, media massa hanya berfungsi sebagai corong pemerintah, informasi berjalan sepihak, yaitu dari penguasa terhadap yang dikuasai. Dampaknya, perlawanan terhadap kaum penjajah selalu kalah dalam tataran pendapat umum (wacana). Tirta membuat berita dari sudut pandang sisi pribumi (yang dijajah), dan berita disajikan untuk kaum pribumi, Tirta menilai media masanya sebagai "pengawal pikiran umum." Di sini, Tirta mengawasi kemerdekaan di bidang informasi (terlepas dari ordinasi Belanda).

Pemerdekaan di bidang wacana dari Tirta merupakan langkah strategis bagi tumbuhnya ideologi nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Langkah Tirta seperti penyiapan lahan subur bagi tumbuhnya ideologi nasionalis, karena wacana merupakan pembentuk moralitas dan ideologi. Kekalahan di dalam perang wacana akan berdampak bagi kekalahan di bidang moralitas dan politik dan, sebaliknya.<sup>23</sup>

Tirta menggunakan *Medan Priyayi* (MP) sebagai sarana untuk melakukan penyadaran kemerdekaan kaum pribumi dari sisi ekonomi dan politik, ini manfaat dari Sjarekat Dagang Islam (SDI) menurut Tirta. Tirta mengungkapkan bahwa penduduk pribumi harus berfungsi sebagai tuan di negerinya sendiri. Caranya, dengan berani berwiraswasta. Tidak boleh kalah oleh para pendatang (orang asing). Karena, dengan pemberdayaan pada sisi ekonomi maka kontrol dari Nederland terhadap kaum

pribumi berkurang. Tirta menggunakan MP sebagai pembentuk sarana suprastruktur.<sup>24</sup>

Francis Bacon pada zaman Renaissance berpendapat bahwa pengetahuan merupakan kekuasaan.<sup>25</sup> Tirta mampu menggunakan MP sebagai sumber kekuasaan. Penyalahgunaan kewenangan Simon dan Wedana diangkat sebagai berita di dalam MP. Simon dan Wedana bersekongkol dalam mengangkat Kades Desa Bapangan. Calon yang terpilih oleh warga desa dikenakan hukum krakal.<sup>26</sup> Kemudian, A. Simon dan wedana mengangkat calon pilihannya. Berita ini mengangkat popularitas media massa MP dan Tirta sampai negeri Belanda.

Media Massa antara lain dapat berfungsi sebagai sarana untuk membesarkan organisasi. Organisasi Budi Utomo (BU) dan SDI dibesarkan oleh media massa. Organisasi BU dibesarkan oleh tulisan-tulisan Doewes Dekker di media berbahasa Belanda. Sedangkan SDI dibesarkan oleh tulisan-tulisan Tirta.

Tirta memfungsikan media massa sebagai sarana pendekonstruksian terhadap sistem komando yang dilakukan pemerintahan Hindia-Belanda, di dalam sistem ini bawahan (yang diberi komando) harus taat pada atasan (pemberi komando), walau pemberi komando melanggar aturan main di dalam pemerintahan. Tirta melakukan pembelaan terhadap

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>25</sup> Harun Hadiwidjono, 1988, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta, Kanisius, hlm. 3.

<sup>26</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Op. Cit.*, hlm. 50.

Brotodiningrat (bupati Madiun) dari tekanan J.J. Donner (residen Madiun) dengan menggunakan kekuatan media massa. Tirto berhasil memberi kemenangan pada Brotodiningrat.<sup>27</sup>

Residen dan Patih serta Kepala Jaksa Madiun bersekongkol untuk menurunkan Bupati Madiun. Ketiganya menggunakan media massa *Bintang Semarang* sebagai pembentuk opini masyarakat. Sementara pada pihak bupati Madiun, Tirto melakukan investigasi untuk membongkar persekongkolan tersebut. Hasil investigasi diberitakan pada media massa *Pembrita Betawi*. Tirto memenangkan wacana dalam perang wacana tersebut, dampaknya Brotodiningrat selamat dari rekayasa penurunan, dan Tirto berhasil menempatkan media massanya sebagai sarana kontrol kebijakan pemerintah. Konflik wacana antara *Pembrita Betawi* (pribumi) dan *Bintang Semarang* (Belanda) dan dimenangkan oleh *Pembrita Betawi* adalah hal pertama dalam sejarah Indonesia.

#### PERLAWANAN DENGAN MENGUNAKAN ORGANISASI

Tirto melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia-Belanda dengan menggunakan sarana suprastruktur (media massa) dan infrastruktur (organisasi), bukan dengan cara militer. Tirto berusaha membentuk sarana infrastruktur di kalangan pribumi untuk menyaingi dominasi pemerintahan Hindia-Belanda. Didirikannya

Sarikat Dagang Islamijah yang berkembang menjadi Sarekat Islam. Sarana infrastruktur tersebut diperkuat dengan sarana suprastruktur pers sebagai pembentuk opini publik.

Agama (Islam) berfungsi sebagai sumber moral.<sup>28</sup> Tirto memberi peran lain bagi agama Islam, yaitu sebagai sarana perekat organisasi, dan organisasi ini berguna sebagai sarana perjuangan kepentingan bersama.

Priyayi merupakan kolektif pemilik kehormatan dan uang pada masyarakat Jawa. Tirto melihat priyayi sebagai kelas tersendiri di dalam masyarakat. Untuk menduduki kelas tersebut pemyaratannya antara lain memiliki pendidikan Barat. Persamaan kelas digunakan Tirto sebagai perekat bagi dibentuknya organisasi priyayi, organisasi ini dapat digunakan sebagai sarana perlawanan terhadap dominasi pemerintah Hindia-Belanda, baik dari sisi wacana dan politis maupun dari sisi perekonomian. Maka, pada tahun 1906, Tirto mendirikan Sarekat Prijaji.

Tirto merupakan salah satu bapak pendiri organisasi Sarikat Prijaji (SP). Organisasi ini bergerak dalam penyokongan perkembangan kalangan menengah pribumi (priyayi). Konsep pendirian organisasi berawal dari Tirto, sedangkan presiden organisasinya adalah Thamrin Mohamad Tabrie (bapaknya Mohamad Husni

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>28</sup> Doyle Paul Jonhson, *Op.Cit.*, hlm. 199.

Thamrin). Tirto memilih mengelola *Medan Priyayi*.

SP melakukan pendudukan terhadap munculnya kalangan menengah pribumi (priyayi). Untuk itu, organisasi SP bergerak pada bidang pendidikan, aktivitas organisasi ini antara lain: mendirikan sekolah dasar dan membangun asrama penitipan anak bagi anak-anak usia sekolah yang orang tuanya bertugas ke luar kota.

Jika *bahasa* digunakan sebagai kriteria penilaian bagi tumbuhnya ideologi nasionalisme, maka organisasi pendukung lahirnya ideologi nasionalisme adalah SP, dengan alasan SP menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar organisasi. Penggunaan bahasa Melayu (bukan bahasa Belanda dan Jawa) di dalam SP, baik disadari maupun tidak disadari, telah mengarahkan anggota organisasi ini untuk sadar akan pentingnya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, organisasi SP turut menghantarkan lahirnya bahasa Indonesia, dengan alasan bahasa Melayu adalah cikal bakal dari bahasa Indonesia. Sedangkan penggunaan bahasa Jawa merujuk pada pengembangan budaya Jawa, dan penggunaan bahasa Belanda merupakan pengembangan budaya Belanda. Karena, Suatu negara (organisasi) merupakan desain dari budayanya.<sup>29</sup>

Tirto turut serta membidani lahirnya organisasi Sarikat Dagang Islam. Yang didirikan tanggal 27 Maret 1909, di rumah

<sup>29</sup> Clifford Geertz, 1994, *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta, Kanisius, hlm. 138.

Tirto di Bogor. Sehingga, disetujui Bogor sebagai pusat organisasi. Organisasi ini anggotanya adalah kaum wiraswasta (pedagang, petani, pekerja bebas). Sedangkan ideologi pengikatnya adalah Islam, yang tidak mempermasalahkan suku dan ras.<sup>30</sup>

Tirto pandai melihat situasi massa. Sewaktu popularitasnya sedang naik, ia menang dalam berbagai konflik di pengadilan. Ia telah melakukan penghancuran terhadap mitos bahwa pejabat Hindia-Belanda adalah sakral, segera ia membangun organisasi SDI, dan mendapat kepercayaan besar.

Agama erat kaitannya dengan kekuasaan. Dengan agama, orang dengan mudah terikat satu sama lainnya. Organisasi SDI berdiri dengan landasan idiil Agama Islam, sehingga pemerintah Belanda mencurigai keberadaan para pemimpin SDI. Alasan lain kecurigaan terhadap SDI adalah, surat permohonan senjata dari para pejuang Aceh ke "Solotan Jepun" tersita oleh pemerintah Hindia-Belanda. Waktu itu Pan-Islamisme dan pemerintah Jepang bekerja sama dalam rangka menandingi hegemoni penjajahan dunia Barat di Timur. Dan, Pan-Islam berkembang lintas batas negara dan ras.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Pimpinan Pusat Sarikat Dagang Islam adalah sebagai berikut: Presiden: Sjech Achmad bin Badjenet; Wakil Presiden: Dokterjawa Mohamad Dagrime; Bendahara: Sjech Said; Sekretaris: Raden Mas Tirto Adi Soeryo. Lihat R.M. Tirto Adi Soeryo, *Sarikat Dagang Islamiah*, di dalam MP tahun III, hlm. 181-195.

<sup>31</sup> Clifford Geertz, *Op.Cit.*, hlm. 87.

SDI dibangun sebagai organisasi legal formal, seseorang di dalam organisasi ini memiliki otoritas berdasarkan pada kelegalannya secara hukum.<sup>32</sup> Sebagai pemilik otoritas legal formal, Tirto melihat bahwa bertele-telanya jalur perdagangan telah meningkatkan harga (merugikan konsumen). Misalnya, batik dari Solo di tanah Pasundan berharga tinggi, dan yang diuntungkan adalah para tengkulak batik. Ia pun mempelopori berdirinya sekolah membatik di Bandung dengan dukungan bupati Bandung, sedangkan di Bogor berdiri sekolah membatik yang dipimpin Gunawan—seorang redaktur MP.<sup>33</sup>

Tirto telah mempelopori lahirnya ideologi nasionalisme di Indonesia pada tahun 1909. Ideologi tersebut dia kembangkan dalam rangka menumbuhkan semangat orang pribumi dalam berwiraswasta. Hal ini diungkapkan Tirto sebagai berikut:

Perniagaan kita makin sempit, dan karena itu kita mesti ambil perniagaan yang dilakukan oleh bangsa asing. Kita anak negeri mesti bisa jadi taoke sendiri, mesti bisa menggunakan uang bank buat digunakan jadi modal dalam segala rupa perniagaan ...<sup>34</sup>

Waktu itu, Tirto telah menguasai peta perkembangan perpolitikan dunia. Pan-Islamisme telah muncul sebagai kekuatan baru di dunia.<sup>35</sup> Dan, Tirto memprediksikan

bahwa Pan-Islamisme akan berpengaruh ke Hindia-Belanda. Perihal ini diungkapkan Tirto sebagai berikut:

Karena selama ini dedemit (Pan-Islamisme) menjadi ketakutan Belanda, maka Nederland nanti terlepas membeli hasil jajahannya via lain kerajaan.

Kedele kita dibeli oleh Nederland via China; Kayu arak kita dibeli oleh Nederland via China; Pinang kita dibeli oleh Nederland via lain kerajaan.<sup>36</sup>

TAS melihat Turki (pusat Pan-Islamisme) berkembang pesat. Bahasa Melayu di negara ini diperlajari. Tirto memperingatkan Turki merupakan ancaman untuk Hindia-Belanda, dengan alasan memungkinkan dibuka perdagangan secara langsung antara Turki dan penduduk Hindia, dan ini merupakan kemerdekaan dari sisi ekonomi. Tirto menyarankan agar pemerintah Hindia-Belanda memperhatikan para pedagang Muslim untuk menangkal hal tersebut. Hal ini diungkapkan Tirto sebagai berikut:

Dengan banggunya Turki patut sekali Pemerintah di Hindia memperhatikan pedang kita kaum Islam, karena ... sedikit saja Turki menyatakan sedikit saja yang mengindahkan kaum Islam di Hindia, maka perindahan kaum Islam di

<sup>32</sup> Doyle Paul Johnson, *Op.Cit.*, hlm. 231-232.

<sup>33</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Op.Cit.*, hlm. 126.

<sup>34</sup> R.M. Tirto Adi Suryo, 1909, *Menonton Wayang Priyayi*, di dalam "Medan Prijaji". Batavia, NV Medan Prijaji, tahun IV, hlm. 851.

<sup>35</sup> Clifford Geertz, 1910, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>36</sup> R.M. Tirto Adisuryo, *Semijong*, di dalam "MP" tahun IV. Batavia, NV Medan Prijaji, hlm. 104-105.

Hindia pada Turki akan semakin besar karena seagama...<sup>37</sup>

<sup>37</sup> R.M. Tirto Adisoerjo, 1910, *Toerki Pada Masa Ini*, dalam MP nomor 11 tahun IV. Batavia, NV Medan Prijaji, hlm. 121-124.

I. Def  
Ijime  
M  
dan  
ijime  
psikol  
mening  
Ijime r  
pada s  
lingkur  
meluas  
negatif  
hak sis  
aman t  
member  
bagi sis  
korban  
Kas  
perhatia  
puluhan  
terhadap  
disebabk  
sebenarn  
sebelum  
pada p  
Jepang,  
disebabk  
Jepang  
materialis  
menikmat  
tersebut.